

## Ketidakhahaman Pemerintah Akibatkan Persoalan Papua

**JOGJA**--Berbagai persoalan masih saja terjadi di Papua. Persoalan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah mulai dari pertikaian antar suku, hingga permasalahan separatisme.

Bahkan posisi letak yang berada di ujung timur Indonesia dan jauh dari pusat pemerintahan negara membuat permasalahan-permasalahan di daerah itu jadi tidak terjamah. Karenanya pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan lagi situasi serius di sana.

"Bila tidak maka Papua bisa-bisa terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Ahmad Syafii Maarif di UMY, Kamis (19/5).

Menurut Buya-sapaan Syafii, persoalan rumit di Papua juga disebabkan faktor sejarah Papua yang masuk NKRI. Hal ini berbeda dengan cara masuknya daerah-daerah lain ke wilayah NKRI.

Ketidakhahaman pemerintah terkait permasalahan yang ada di Papua juga jadi persoalan. Untuk itu pendekatan yang harusnya dipakai oleh pemerintah untuk Papua adalah dari sisi Sosio-Antropologis.

"Pemerintah masih menggunakan pendekatan militer, dan pendidikan di Papua juga masih terbelakang seperti orang-orang Papua tidak mengenal pahlawan-pahlawan nasional Indonesia," tandasnya.

Sementara pakar dari UIN Sunan Kalijaga, Prof Dr Munir Mul Khan mengungkapkan permasalahan di Papua hanya dapat diselesaikan dengan aksi kemanusiaan dan bukan militer. Contohnya Suyoto, bupati Bojonegoro yang sudah dua kali memimpin Bojonegoro dan sukses.

"Semua orang yang memilihnya tidak ia janjikan jabatan di pemerintahan atau uang. Tapi ia melakukan gerakan nyata

dengan membangun jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga ia dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro hingga memimpin dua kali," ungkapnya.

Karena itulah Muhammadiyah harus menolong kaum yatim piatu dan lain-lain bukan dengan harapan agar orang yang ditolong kemudian akan masuk Islam atau masuk Muhammadiyah, namun murni untuk kemanusiaan. Hal itu dibutuhkan karena Muhammadiyah menolong orang sesuai dengan ajaran Islam, tapi tujuan utama menolong itu adalah untuk kemanusiaan.

"Sehingga kaitannya dengan Papua, yang dapat kita kedepankan adalah menolong masyarakat Papua dari sisi kemanusiaan, dan bukannya militer," ujarnya.

Dosen STAIN Al-Fatah di Papua, Ade Yamin MA mengatakan, di Papua banyak kasus yang tidak diungkapkan ke publik dan hanya diketahui oleh masyarakat Papua. Masyarakat Papua menganggap orang Papua asli adalah mereka yang berkulit hitam dan berambut keriting.

"Saya yang berkulit hitam namun berambut lurus pun bisa dikatakan sebagai kaum pendatang. Dan di Papua, hanya orang-orang asli Papua yang diperbolehkan memimpin suku, bahkan menjadi pejabat-pejabat daerah," ungkapnya.

Ade Yamin menambahkan, pemerintah masih menggunakan militer dalam pendekatan terhadap orang-orang Papua. Banyak orang-orang Papua berkulit hitam berambut keriting yang sering ditembak oleh tentara-tentara di Papua. "Masyarakat Papua menganggap masyarakat pendatang sebagai ancaman," jelas Ade Yamin.

Dosen UMY, Zuly Qodir mengatakan, pemerintah harus lebih efektif mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan bukannya militer. (ptu)